



Analisis Sistem Audit Keuangan Sektor Publik Beserta Standar dan Regulasi yang Berlaku

Alfina Zahara Zein¹, Efrida Handayani Batubara²

^{1,2}, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author : ✉ Zeinalfina46@gmail.com

ABSTRACT

Public sector audits are a crucial element in ensuring accountability and transparency in state financial management. As public demand for good governance increases, the role of public sector audits is increasingly under scrutiny. Public sector audits aim to evaluate whether the use of state financial resources has been carried out economically, efficiently, and effectively, and in compliance with regulations. This type of research is qualitative research, which means collecting data naturally with the aim of interpreting the phenomena that occur where the researcher is a key instrument. The characteristics of qualitative research are: 1) conducted in natural conditions, 2) more descriptive, 3) paying attention to processes as well as products, 4) tending to analyze data inductively. The history of public sector audits in Indonesia began in the reform era with demands for better state financial management, free from corruption, collusion, and nepotism, and accountability. Public sector audits have experienced ups and downs, but continue to develop with the enactment of laws in the field of state finance. The main differences between public sector audits and business sector audits lie in motivation, funding sources, accountability, organizational structure, accounting systems, financial reports, accounting standards, auditors involved, and audit standards used. The public sector financial audit cycle consists of several stages, namely audit planning, establishing regulations, preparing audit programs, conducting audits, making lists of findings, discussing audit results, completing reports, following up on findings, and issuing audit report results. The techniques used in public sector financial audits include analytical procedures, inspections, confirmations, inquiries, calculations, tracing, examining supporting evidence, observations, re-execution, computer-assisted audit techniques, tests of controls, and substantive tests.

Keywords

Public Sector Audits, Accountability, Regulation, Governance



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Audit sektor publik merupakan elemen krusial dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Seiring dengan

meningkatnya tuntutan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peran audit sektor publik semakin mendapat sorotan. Audit sektor publik bertujuan untuk mengevaluasi apakah penggunaan sumber daya keuangan negara telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif, serta mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, audit sektor publik bukan hanya berfokus pada aspek keuangan semata, tetapi juga mencakup penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.

Namun, pelaksanaan audit sektor publik masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teoretis maupun praktis. Secara teoretis, terdapat beragam pendekatan dan prinsip-prinsip yang mendasari audit sektor publik. Pemahaman yang mendalam tentang landasan teori ini diperlukan untuk memastikan bahwa audit sektor publik dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan tujuannya. Selain itu, kompleksitas regulasi dan standar audit yang berlaku di sektor publik juga menjadi tantangan tersendiri bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Dari sisi praktis, pelaksanaan audit sektor publik seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah auditor yang kompeten maupun dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang praktik terbaik dalam audit sektor publik, seperti siklus audit, teknik audit, dan penerapan teknologi audit modern, dapat menghambat efektivitas dan efisiensi proses audit. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek teoretis dan praktis dalam audit sektor publik, agar dapat meningkatkan kualitas dan manfaat dari kegiatan audit ini bagi tata kelola keuangan negara yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berarti mengumpulkan data secara alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Karakteristik penelitian kualitatif adalah 1) dilakukan pada kondisi yang alamiah, 2) lebih bersifat deskriptif, 3) memperhatikan proses dan juga produk, 4) cenderung menganalisis data secara induktif (Anggito & Setiawan, 2018). Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan kajian pustaka atau library research. Dalam metode penelitian ini data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, koran, internet dan hal lain yang berhubungan dengan aspek penelitian sebagai upaya untuk memperoleh data yang valid. Teknik analisis data dilakukan dari pengumpulan data, kemudian reduksi data yaitu menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dibaca, dipelajari, maka

dilakukanlah reduksi data (Musfah, 2016). Langkah selanjutnya adalah pembahasan dan penyajian data sehingga menghasilkan sebuah informasi lalu diambil kesimpulan dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Audit Sektor Publik

Salah satu tuntutan reformasi adalah reformasi keuangan negara, yaitu terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan dapat diterapkannya sistem pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif, serta menaati asas. Pengelolaan Keuangan, sebagai elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dikelola secara efektif dan efisien serta memperhatikan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, antara lain (1) asas tahunan, (2) asas universalitas, (3) asas kesatuan, (4) asas spesialisasi, (5) asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, (6) asas profesionalitas, (7) asas proporsionalitas, (8) asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta (9) asas audit keuangan oleh badan. pemeriksa yang bebas dan mandiri. Untuk mencapai asas-asas tersebut, harus ada sebuah perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan negara/daerah, dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pelaksanaan audit kinerja di berbagai negara, termasuk Indonesia terus mengalami pasang surut. Sebagai gambaran, pada Netherlands Court of Audit (BPK) Belanda), perkembangan audit kinerja dimulai dengan mandat untuk melaksanakan audit kinerja pada tahun 1976. Pada awalnya, audit kinerja berfokus pada efisiensi. Kemudian mereka mulai menyusun dan terus menyempurnakan manual audit kinerja yang ada. Pada perkembangan selanjutnya, mereka mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam audit kinerja (antara lain untuk mengumpulkan dan menganalisis data), serta menggunakan pendekatan strategis dalam menentukan tema audit. Pada BPK Belanda, audit kinerja yang berfokus pada mutu dan akuntabilitas kebijakan pemerintah merupakan perluasan dari audit keuangan yang berfokus pada penganggaran.

Di Australian National Audit Office (BPK Australia), audit kinerja dimulai pada akhir tahun 1970-an. Audit kinerja diperkenalkan di Australia seiring dengan meningkatnya ketertarikan pemerintah, parlemen, dan masyarakat terhadap efektivitas program dan efisiensi administrasi pemerintah. Pada saat itu, departemen pemerintah juga diberikan lebih banyak kebebasan untuk mengelola operasi mereka, dengan sedikit kendali dari pusat. Pada awalnya, pemeriksaan. kinerja hanyalah sebuah divisi kecil dari ANAO. Antara tahun 1980 dan 1983. ANAO hanya membuat tujuh laporan audit kinerja. Saat ini. ANAO menyelesaikan sekitar 50 audit kinerja setiap tahunnya.

Di Indonesia, audit kinerja juga mulai diperkenalkan pada tahun 1976, yaitu dengan dimulainya management audit course di Badan Pemeriksa Keuangan atas kerja sama dengan US-GAO, Serupa dengan negara lain,

perkembangan audit kinerja di Indonesia juga mengalami pasang surut. Dalam kurun waktu 2004- 2007, BPK telah melaksanakan 99 audit kinerja, dengan rincian sebanyak 37 audit dilakukan di kantor pusat dan 62 audit dilakukan di kantor perwakilan daerah. Rekap audit kinerja selama tahun 2004-2007 menunjukkan bahwa audit kinerja atas BUMN masih sangat sedikit.

Audit eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh BPK sebagaimana tercatat dalam Pasal 23E UUD tahun 1945 yang telah diamandemen menetapkan bahwa untuk mengaudit pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara, diadakan BPK yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil audit itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BPK merupakan badan yang tidak berada di bawah pemerintah sehingga diharapkan dapat bersikap independen. Agar lebih menunjang tugasnya, BPK RI telah diberi perangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu:

- 1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- 2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- 4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Sementara itu, Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terdiri dari

- 1) BPKP yang bertanggung jawab kepada Presiden.
- 2) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan
- 3) Pengawasan intern. Inspektorat Provinsi.
- 4) Inspektorat Kabupaten/Kota.

Perbedaan Audit Sektor Publik dan Audit Sektor Bisnis

Perbedaan antara sektor publik dengan sektor bisnis dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Perbedaan antara sektor publik dengan entitas bisnis (sektor swasta)

No	URAIAN	PEMERINTAH (SEKTOR PUBLIK)	ENTITAS BISNIS (SEKTOR SWASTA)
1	Motivasi	Tidak mencari keuntungan	Mencari keuntungan
2	Proses Politik	Sangat terpengaruh oleh proses politik, pemilihan pimpinan daerah, kementerian dan lembaga negara.	Tidak terpengaruh akan proses polotik.

3	Sumber Pembiayaan	Pajak, retribusi, subsidi dan utang.	Modal sendiri, laba ditahan, utang dan penerbitan saham.
4	Pertanggungjawaban	Kepada masyarakat dan parlemen (DPR/DPRD).	Kepada pemegang saham dan kreditur.
5	Struktur Organisasi	Birokratis, hierarkis, dan kaku.	Fleksibel, fungsional, piramid, dan datar.
6	Sistem Akuntansi	Kas/modifikasi kas/akrual.	Akrual penuh.
7	Laporan Keuangan	Neraca, Aliran Kas, Dan Laporan Realisasi Anggaran, Catatan Atas Laporan Keuangan.	Neraca, Aliran Kas, Laporan Laba Rugi, Dan Laporan Perubahan Modal.
8	Standar Akuntansi	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
9	Auditor	Auditor Pemerintah.	Kantor Akuntan Publik.
10	Standar Audit	Standar Audit Akuntan Sektor Publik.	Standar Audit Akuntan Publik.

Sistem Audit Keuangan Sektor Publik

Prinsip-Prinsip Dasar Audit

Auditor sektor publik harus selalu menjaga independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Independensi berarti auditor tidak boleh memiliki hubungan kepentingan dengan entitas yang diaudit, yang dapat mempengaruhi penilaian mereka. Objektivitas berarti auditor harus bersikap adil dan tidak memihak. Kompetensi profesional juga merupakan prinsip penting, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan audit dengan baik. Auditor harus mematuhi kode etik profesi yang menekankan integritas, kerahasiaan, dan tanggung jawab publik.

Jenis-Jenis Audit

Audit di sektor publik dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis utama:

1. **Audit Keuangan (Financial Audit)** Audit keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh entitas sektor publik mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Auditor akan memeriksa catatan akuntansi, transaksi keuangan, dan laporan keuangan

untuk menilai apakah informasi tersebut telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2. **Audit Kinerja (Performance Audit)** Audit kinerja menilai apakah program, proyek, atau kegiatan pemerintah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Audit ini melihat lebih jauh daripada sekadar angka keuangan dan menilai bagaimana sumber daya digunakan dan hasil apa yang dicapai.
3. **Audit Kepatuhan (Compliance Audit)** Audit kepatuhan mengevaluasi apakah entitas telah mematuhi peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa operasi dan kegiatan entitas dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang ada.

Proses dan Tahapan Audit

Proses audit sektor publik biasanya melalui beberapa tahapan utama:

1. **Perencanaan Audit** Pada tahap ini, auditor menentukan ruang lingkup, tujuan, dan metodologi audit. Perencanaan melibatkan pemahaman mendalam tentang entitas yang diaudit, termasuk struktur organisasi, lingkungan operasi, dan sistem pengendalian internal. Auditor juga mengidentifikasi risiko utama dan merencanakan prosedur audit yang sesuai.
2. **Pelaksanaan Audit** Tahap ini melibatkan pengumpulan bukti audit melalui berbagai teknik seperti pemeriksaan dokumen, wawancara dengan staf, observasi langsung, dan pengujian substantif. Auditor melakukan pengujian untuk menilai apakah catatan keuangan dan operasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
3. **Pelaporan Audit** Setelah bukti dikumpulkan dan dianalisis, auditor menyusun laporan audit yang mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan ini harus jelas, komprehensif, dan didukung oleh bukti yang memadai. Temuan audit dapat mencakup identifikasi kesalahan, ketidaksesuaian, dan area untuk perbaikan.
4. **Tindak Lanjut** Tahap tindak lanjut melibatkan pemantauan implementasi rekomendasi audit oleh entitas yang diaudit. Auditor memeriksa apakah tindakan yang disarankan telah diambil dan apakah perbaikan telah dilakukan.

Teknik dan Metode Audit

Teknik dan metode yang digunakan dalam audit sektor publik meliputi:

1. **Sampling dan Pengujian Substansif** Auditor sering menggunakan teknik sampling untuk memeriksa sebagian data sebagai representasi dari keseluruhan. Pengujian substansif dilakukan untuk menguji validitas dan keakuratan data keuangan.

2. **Teknik Audit Berbasis Risiko** Pendekatan berbasis risiko mengidentifikasi area yang memiliki risiko tinggi dan memfokuskan sumber daya audit pada area tersebut. Hal ini memungkinkan auditor untuk memberikan perhatian lebih pada bagian-bagian yang paling mungkin menimbulkan masalah.
3. **Penggunaan Teknologi Informasi** Teknologi informasi memainkan peran penting dalam audit sektor publik. Auditor menggunakan perangkat lunak audit untuk menganalisis data keuangan, mengidentifikasi anomali, dan menghasilkan laporan. Penggunaan teknologi juga memungkinkan untuk audit yang lebih efisien dan mendalam.

Sistem Pengendalian Intern (Internal Control)

Sistem pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan entitas. Sistem ini mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Evaluasi efektivitas pengendalian intern membantu auditor dalam menilai kemampuan entitas untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dan kesalahan.

1. **Lingkungan Pengendalian** Mencakup sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen serta dewan yang berkaitan dengan pengendalian internal.
2. **Penilaian Risiko** Proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan entitas.
3. **Kegiatan Pengendalian** Tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan diterapkan dengan efektif.
4. **Informasi dan Komunikasi** Sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi, menangkap, dan mengkomunikasikan informasi yang relevan dalam bentuk yang dapat memungkinkan personel untuk melaksanakan tanggung jawab mereka.
5. **Pemantauan** Proses pemantauan kualitas kinerja pengendalian internal seiring waktu.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam audit sektor publik mencakup proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan entitas. Pendekatan ini membantu auditor untuk fokus pada area dengan risiko tertinggi dan memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan efektif.

Audit Forensik

Audit forensik bertujuan untuk mendeteksi dan menyelidiki kecurangan serta penyalahgunaan dana publik. Teknik investigasi yang digunakan meliputi

analisis data, wawancara, dan teknik audit forensik lainnya untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum. Audit forensik juga melibatkan pelaporan dan presentasi temuan secara rinci dan komprehensif.

Pelaporan dan Komunikasi

Laporan audit harus disusun dengan struktur yang jelas dan isi yang komprehensif, mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Penyampaian laporan kepada pihak yang berkepentingan harus dilakukan dengan strategi komunikasi yang efektif untuk memastikan pemahaman dan tindakan yang tepat. Laporan audit harus mengandung bukti yang cukup dan relevan untuk mendukung temuan dan rekomendasi yang diberikan.

Studi Kasus dan Aplikasi Praktis

Analisis studi kasus audit di sektor publik memberikan pembelajaran berharga tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan audit. Studi kasus juga membantu dalam memahami aplikasi praktis dari teori audit dalam konteks nyata. Studi ini sering mencakup analisis detail dari audit tertentu, termasuk metode yang digunakan, temuan utama, dan hasil dari rekomendasi audit.

Etika dan Profesionalisme

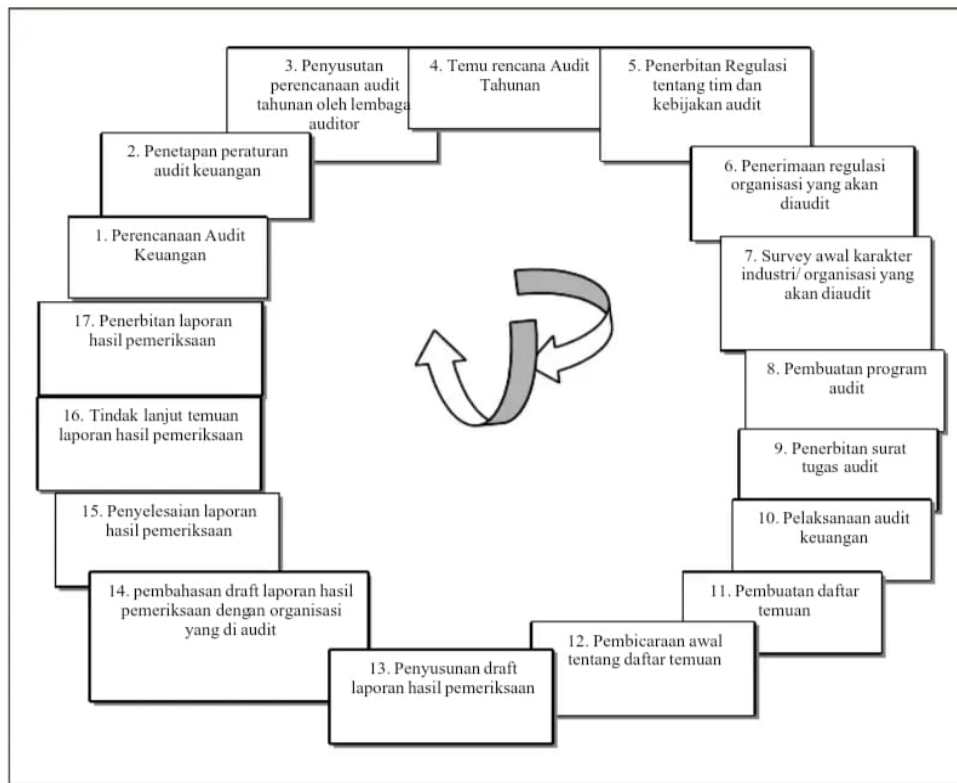
Auditor sektor publik harus mematuhi kode etik profesi yang mengedepankan integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Tantangan etika sering kali muncul dalam pelaksanaan audit, seperti tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, konflik kepentingan, dan situasi yang dapat menguji integritas auditor. Auditor harus siap menghadapi tantangan ini dengan integritas tinggi dan memastikan bahwa hasil audit mereka tetap obyektif dan dapat diandalkan.

Tren dan Tantangan Masa Depan

Perkembangan teknologi dan globalisasi menghadirkan tantangan dan peluang baru dalam audit sektor publik. Teknologi seperti analitik data, kecerdasan buatan (AI), dan blockchain dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit. Namun, teknologi ini juga memerlukan penyesuaian dalam metode dan pendekatan audit. Auditor perlu terus mengembangkan keterampilan mereka dan tetap up-to-date dengan perkembangan teknologi untuk tetap relevan dalam lingkungan yang terus berubah. Tantangan lain termasuk perubahan regulasi, tuntutan transparansi yang lebih besar, dan kompleksitas operasi pemerintah yang meningkat.

Siklus Audit Keuangan Sektor Publik

Siklus dalam audit keuangan sektor publik adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Siklus audit keuangan sektor publik

1. Perencanaan audit keuangan

Tahap perencanaan audit terdiri dari langkah-langkah:

- a) Pemahaman atas sistem Akuntansi Keuangan Sektor Publik
- b) Pemahaman atas sistem akuntansi sangatlah penting karena saat ini audit sektor publik tidak lagi berfokus pada laporan realisasi anggaran saja tetapi juga laporan keuangan lainnya seperti neraca, laporan surplus/defisit, dan laporan arus kas. Jadi. Auditor harus memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi keuangan publik.
- c) Penentuan tujuan dan lingkup audit
- d) Tujuan dan lingkup audit sektor publik sangat tergantung pada mandat dari lembaga audit yang bersangkutan. Audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor eksternal umumnya bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan (memberikan opini) organisasi sektor publik, sedangkan audit atas penyusunan laporan keuangan oleh pengawas bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal dan koreksi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam menentukan tujuan dan ruang lingkup, auditor harus memastikan bahwa tujuan dan ruang lingkup audit yang ditetapkan telah sesuai dengan mandat serta wewenang lembaga audit dan pengawas yang bersangkutan. Dalam konteks audit atas laporan keuangan organisasi sektor publik, pengawas berwenang:

- a. Melakukan review atas sistem akuntansi dan pengendalian internal serta memberikan rekomendasi perbaikan atas kelemahannya;
- b. Melakukan pengujian dan koreksi atas kesalahan pencatatan akuntansi sehingga laporan keuangan akan dihasilkan dengan informasi yang dapat diandalkan.

2. Penetapan Regulasi Audit Keuangan

Penetapan prosedur atau aturan audit keuangan merupakan bagian yang penting dalam proses audit karena dibutuhkan aturan untuk memberikan arahan yang jelas, dan sebagai kontrol agar pelaksanaan audit laporan keuangan bisa memberikan opini yang tepat.

3. Penyusunan Perencanaan Audit Tahunan Oleh Lembaga Auditor

Langkah selanjutnya setelah ditetapkan aturan dan regulasi dalam melakukan audit keuangan adalah menyusun rencana keuangan audit tahunan oleh lembaga auditor. Perencanaan audit merupakan tahap yang vital dalam audit. Perencanaan audit yang matang akan sangat menentukan kesuksesan audit. Perencanaan audit yang baik merupakan faktor penting untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai pendukung isi laporan audit.

4. Temu rencana audit tahunan

Setelah lembaga auditor selesai menyusun perencanaan audit tahunan, kemudian mereka bertemu dengan kepala atau pimpinan organisasi sektor publik untuk membicarakan perencanaan audit yang sudah disusun.

5. Penerbitan Regulasi tentang Tim dan Kebijakan Audit Tahunan

Apabila sudah menetapkan rencana yang matang, tahap selanjutnya adalah penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan. Regulasi yang ditetapkan dalam tahapan ini menyangkut tim atau personel yang akan melakukan audit terhadap organisasi sektor publik maupun regulasi dalam menjalankan proses audit.

6. Penerimaan Regulasi Organisasi yang Akan Diaudit

Setelah regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan diterbitkan tersebut, kemudian regulasi tersebut akan diterima oleh lembaga pemeriksa sehingga bisa melakukan proses audit di lembaga atau organisasi sektor publik.

7. Survei Awal Karakter Industri/Organisasi yang Akan Diaudit

Tahap selanjutnya dalam siklus audit sektor publik ini adalah survei awal terhadap karakter industri/organisasi yang akan diaudit.

8. Pembuatan Program Audit

Untuk setiap area yang diaudit, auditor harus menyusun langkah-langkah audit yang akan dilakukannya. Langkah-langkah ini tertuang dalam program audit. Suatu program audit akan berisi:

- Tujuan audit untuk setiap area
- Prosedur audit yang akan dilakukan
- Sumber bukti audit

- Deskripsi mengenai kesalahan (*error*)

9. Penerbitan Surat Tugas Audit

Setelah program audit selesai dibuat, maka pihak organisasi sektor publik segera mengeluarkan surat tugas kepada lembaga pemeriksa (auditor) untuk melaksanakan audit.

10. Pelaksanaan Audit Keuangan

Dalam pelaksanaan audit keuangan, auditor melakukan hal-hal berikut:

a. Menilai Pengendalian Internal.

Suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (seperti kepala daerah, instansi/dinas, pimpinan LSM, pimpinan politik, dan segenap personel) disesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut:

- kendalan atau reliabilitas laporan keuangan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
- efektivitas dan efisiensi operasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang dirancang oleh organisasi sektor publik untuk menjaga aset yang dimiliki agar terbebas dari kecurangan dan penyalahgunaan. Hal inilah yang disebut sebagai pengendalian internal. Jenis-jenis pengendalian internal adalah sebagai berikut:

- Organisasi penyerahan wewenang dan tanggungjawab, termasuk jalur pelaporan untuk semua aspek operasi dan pengendaliannya, harus disebabkan secara rinci dan jelas.
- Pemisahan Tugas Salah satu fungsi utama pengendalian adalah pemisahan tugas dan tanggungjawab. Apabila kedua hal tersebut digabungkan, maka seseorang dapat saja mencatat dan memproses sebuah transaksi secara lengkap. Dengan kata lain, pemisahan tugas pimpinan dapat mengurangi risiko terjadinya manipulasi maupun kesalahan yang disengaja.
- Fisik. Pengendalian ini berhubungan supervisi aset. Prosedur dan keamanan yang memadai harus dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa akses langsung maupun tidak langsung melalui dokumen aset terbatas pada personel yang berwenang.
- Persetujuan dan Otorisasi. Seluruh transaksi harus ditorisasi atau disetujui oleh orang yang tepat. Batas wewenang juga harus dijelaskan.
- Akuntansi. Pengecekan atas keakuratan catatan, penghitungan jumlah total, rekonsiliasi, pemakaian nomor rekening, jurnal, dan akuntansi untuk dokumen.

- Personalia. Keberadaan prosedur akan menjamin penempatan personel sesuai dengan kemampuan dan tanggungjawabnya.
- Supervisi. Setiap sistem pengendalian internal harus mencakup supervisi oleh atasan yang bertanggungjawab terhadap transaksi dan pencatatansehari-hari.
- Manajemen. Ini adalah pengendalian yang dilakukan oleh manajemen di luar tugas rutinnya, yang meliputi pengendalian secara keseluruhan oleh fungsi pengendalian internal dan prosedur review khusus lainnya.

b. Melakukan Prosedur Analitis

Prosedur analitis akan membantu auditor dengan mendukung dan meningkatkan pemahamannya tentang operasi organisasi yang diaudit. Prosedur analitis juga membantu auditor dalam mengidentifikasi hubungan yang tidak sewajarnya dan fluktuasi data yang tidak diharapkan. Hal ini dapat dipakai sebagai indikator area risiko salah saji yang tinggi. Ada enam langkah yang harus dilakukan auditor dalam melakukan prosedur analitis yaitu:

- a) mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat.
- b) mengembangkan ekspektasi.
- c) melakukan perhitungan dan perbandingan.
- d) menganalisis data..
- e) menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan yang signifikan.
- f) menentukan pengaruh perbedaan atau penyimpangan terhadap perencanaan audit.

11. Pembautan Daftar Temuan

Setelah melakukan kegiatan pelaksanaan audit, auditor biasanya mendapatkan temuan-temuan terkait dengan keuangan klien. Temuan-temuan tersebut kemudian didaftar sebagai bukti dalam penyampaian pendapat nantinya.

12. Pembicaraan Awal tentang Daftar Temuan

Berdasarkan temuan-temuan di lapangan, kemudian auditor melakukan pembicaraan dengan pimpinan organisasi sektor publik terkait temuan tersebut. Dalam tahap ini, auditor akan melakukan cross-check atas hasil temuannya dengan fakta yang terjadi dilapangan.

13. Penyusunan Draf Laporan Hasil Pemeriksaan

Setelah hasil temuan auditor dibicarakan atau melakukan cross-check dengan pejabat organisasi sektor publik, auditor kemudian menyusun draf laporan hasil pemeriksaan.

14. Pembahasna draf laporan hasil pemeriksaan dengan organisai yang diaudit

Dari draf laporan hasil pemeriksaan yang telah disusun, auditor lalu membicarakan atau membahasnya dengan pimpnan organisasi

sektor publik. Dalam tahap ini, auditor memastikan apa yang telah disusun di dalam draf laporan hasil pemeriksaan sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Setelah itu, auditor juga memastikan kelengkapan hal-hal yang perlu dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan.

15. Penyelesaian laporan hasil pemeriksaan

Setelah melakukan pembahasan draf laporan hasil pemeriksaan dan pastikan kelengkapan serta kesepakatan mengenai draf tersebut menjadi laporan hasil pemeriksaan akhir.

16. Tindak Lanjut Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan, auditor melakukan tindak lanjut atau dengan kata lain, memberikan rekomendasi perbaikan kepada organisasi sektor publik.

17. Penerbitan laporan hasil pemeriksaan

Tahap terakhir dari siklus audit keuangan adalah penerbitan laporan hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi yang telah diaudit tersebut.

E. Teknik Audit Keuangan Sektor Publik

1. Prosedur Analitis (Analytical Procedures)

Prosedur analitis terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan diantara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal, atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik, seperti analisis regresi.

Contoh prosedur analitis adalah membandingkan item belanja menurut anggaran dan item realisasi belanja. Hasil perbandingan itu akan menunjukkan ada tidaknya penyimpangan jumlah realisasi belanja dari jumlah yang dianggarkan sebelumnya.

2. Inspeksi (inspecting)

Inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Prosedur ini digunakan secara luas dalam auditing. Inspeksi sering kali digunakan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, baik bottom-up maupun top-down. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, auditor dapat menentukan ketetapan persyaratan dalam faktur atau kontrak yang memerlukan pengujian bottom-up atas akuntansi transaksi tersebut. Pada saat yang sama, auditor seringkali mempertimbangkan implikasi bukti dalam konteks pemahaman faktor-faktor ekonomi dan persaingan entitas.

Contoh kegiatan inspeksi adalah pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi seperti rekening bank, kwitansi, atau tanda terima lainnya untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.

3. Konfirmasi (confirming)

Kegiatan konfirmasi adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari independen di luar organisasi sektor publik yang diaudit.

Contoh kegiatan konfirmasi adalah meminta keterangan kepada bendahara pengeluaran terkait bukti-bukti transaksi pembelian atau pengalokasian anggaran yang telah dilakukannya. Kegiatan ini akan menunjukkan apakah bukti transaksi tersebut fiktif atau benar adanya, selain keterangan-keterangan lainnya terkait bukti tersebut.

4. Permintaan keterangan (inquiring)

Kegiatan ini meliputi permintaan keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Permintaan keterangan tersebut biasanya ditunjukkan kepada manajemen atau karyawan organisasi sektor publik, yang umunya berupa pertanyaan-pertanyaan yang timbul setelah dilaksanakannya prosedur analitis.

Contoh kegiatan permintaan keterangan adalah auditor meminta keterangan bendahara pengeluaran kas atas ketidaksesuaian jumlah pengeluaran (berdasarkan bukti dari transaksi yang ada) dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Penghitungan (counting)

Dua aplikasi yang paling umum dari perhitungan adalah

- perhitungan fisik sumberdaya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada dan
- akuntansi seluruh dokumen, dengan nomor urut yang telah dicetak.

Contoh kegiatan perhitungan adalah auditor menghitung aset yang telah dibeli bagian pendapatan berdasarkan bukti transaksi yang ada.

6. Penelusuran (tracing)

Dalam penelusuran, yang sering kali disebut penelusuran ulang auditor yaitu memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang diberikan oleh dokumen tersebut telah dicatat dengan benar dalam catatan akuntansi.

Contoh kegiatan penelusuran adalah auditor membandingkan antara angka yang tertera dalam kwitansi transaksi yang telah dilakukan dan jumlah angka yang tertera dalam jurnal.

7. Pemeriksaan bukti pendukung (vouching)

Pemeriksaan bukti pendukung meliputi: pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi dan mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validasi dan ketelitian pencatatan akuntansi. Contoh kegiatan pemeriksaan bukti pendukung adalah auditor memilih ayat jurnal pembelian ATK di jurnal, kemudian membandingkannya dengan kwitansi pembelian ATK tersebut atau tanda terima lainnya.

8. Pengamatan (observing)

Pengamatan berkaitan dengan memperhatikan dan menyaksikan pelaksanaan beberapa kegiatan atau proses. Kegiatannya dapat berupa pemrosesan rutin atas jenis transaksi tertentu, seperti penerimaan kas, untuk melihat apakah para pekerja sedang melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan kebijaksanaan dan prosedur organisasi sektor publik.

Contoh kegiatan pengamatan adalah auditor mengamati kegiatan bendahara gaji dalam menjurnal ketika mengeluarkan gaji kepada para pegawai.

9. Pelaksanaan ulang (reperforming)

Salah satu prosedur audit yang penting adalah pelaksanaan ulang perhitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik yang diaudit.

Contoh kegiatan pelaksanaan ulang adalah auditor menghitung ulang penyusutan kendaraan milik organisasi berdasarkan umur ekonomis yang sebenarnya, kemudian dibandingkan dengan pencatatan beban penyusutan kendaraan yang telah dilakukan.

10. Teknik audit berbantuan komputer (computer assisted audit techniques)

Apabila catatan akuntansi organisasi sektor publik dilaksanakan melalui media elektronik, maka auditor dapat menggunakan teknik audit berbantuan komputer untuk membantu melaksanakan beberapa prosedur yang telah diuraikan sebelumnya.

Contoh kegiatan auditor berbantuan komputer adalah auditor, dengan bantuan komputer, memeriksa angka-angka dalam file jurnal bendahara dan membandingkannya dengan kwitansi pembelian, kwitansi pendapatan, dan bukti-bukti transaksi lainnya.

11. Pengujian pengendalian

Terdapat dua jenis pengujian pengendalian yaitu:

- a. Pengujian pengendalian yang berkaitan langsung dengan keefektifan desain kebijakan atau prosedur dan apakah benar-benar digunakan dalam kegiatan organisasi.
- b. Pengujian pengendalian yang berkaitan dengan keefektifan kebijakan dan prosedur serta bagaimana pengaplikasiannya, konsistensinya dengan aplikasi terdahulu, dan oleh siapa aplikasi tersebut dilakukan selama periode audit.

Contoh kegiatan pengujian pengendalian adalah auditor membandingkan dokumen SOP atau petunjuk teknis pegawai, dan mengamati pelaksanaannya di lapangan.

12. Pengujian substantif

Dua kategori substantif adalah:

- a. Prosedur analitis, yang merupakan prosedur dalam menyediakan bukti-bukti tentang validitas perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca, sebaliknya tentang kesalahan atau ketidak beresan yang terjadi
- b. Pengujian yang terinci atas transaksi atau neraca merupakan pengujian untuk menyediakan bukti-bukti tentang validitas

perlakuan akuntansi atas transaksi dan neraca, atau sebaliknya, tentang kesalahan atau ketidak beresan yang terjadi.

Contoh kegiatan pengujian substantif adalah auditor memeriksa secara rinci angka dan jumlah transaksi yang telah terjadi, dimana dari pemeriksaan seluruh bukti transaksi, catatan dalam jurnal, dapat ditemukan apakah ada kesalahan atau ketidak beresan.

KESIMPULAN

Sejarah audit sektor publik di Indonesia dimulai sejak era reformasi dengan tuntutan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, bersih dari KKN, dan akuntabel. Audit sektor publik mengalami pasang surut, namun terus berkembang dengan ditetapkannya perangkat undang-undang di bidang keuangan negara. Perbedaan utama antara audit sektor publik dan audit sektor bisnis terletak pada motivasi, sumber pembiayaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, sistem akuntansi, laporan keuangan, standar akuntansi, auditor yang terlibat, dan standar audit yang digunakan.

Sistem audit keuangan sektor publik di Indonesia diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai acuan bagi BPK, akuntan publik, dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Siklus audit keuangan sektor publik terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perencanaan audit, penetapan regulasi, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pembuatan daftar temuan, pembahasan hasil audit, penyelesaian laporan, tindak lanjut temuan, dan penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Teknik-teknik yang digunakan dalam audit keuangan sektor publik meliputi prosedur analitis, inspeksi, konfirmasi, permintaan keterangan, penghitungan, penelusuran, pemeriksaan bukti pendukung, pengamatan, pelaksanaan ulang, teknik audit berbantuan komputer, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2019). *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*, 1-52.
- Hardian, Y. (2023). *Memperkuat Pengawasan Keuangan: Kontribusi Insinyur dalam Audit Sektor Publik*. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 4(1), 54-64.
- Kuntadi, C. (2023). *Audit Internal Sektor Publik*. Penerbit Salemba.

- Nasution, D. A. D., Ramadhan, P. R., & Barus, M. D. B. (2019). Audit Sektor Publik: Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Payamta, P. (2023). Audit Sektor Publik: Membangun Pilar Integritas Pemerintahan.
- Rai, G. A. (2008). Audit Kinerja Pada Sektor Publik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Rini, D. D. O., Abidin, F. I. N., & Mediawati, N. F. (2020). Analisis Auditor Internal sebagai Whistleblower Internal pada Instansi Sektor Publik dan Swasta. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), 366-378.
- Sihite, R. N., & Holiawati, H. (2017). Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Staf Akuntansi Dan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(2), 81-92.
- Zamzami, F., & Pramesti, A. E. (2018). Audit keuangan sektor publik untuk laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: UGM PRESS.